



**PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI**



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik merupakan laporan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Publik dan juga sebagai bahan acuan untuk perbaikan dalam memberikan layanan secara umum, dan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi secara khusus. Di dalam laporan ini juga menyajikan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola layanan, rincian layanan informasi, target yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yakni tahun 2025.

Laporan ini merupakan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi selama tahun Anggaran 2025 yang berada pada DPA Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Ditahun 2026 PPID Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi kepada masyarakat, sehingga kedepan segala persoalan yang menyangkut aduan dan permohonan masyarakat dapat terlayani dengan baik

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI



Drs. SARDAINI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI	4
Gambaran Umum Pelayanan Informasi	4
2.1 Sumber Daya Manusia	5
2.2 Sarana dan Prasarana	7
2.3 Anggaran	10
2.4 Data Pelayanan Informasi	8
2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	13
2.6 Data Penyelesaian Sengketa Informasi	15
2.7 Evaluasi dan Capaian Pelayanan	16
2.8 Data Sektoral Koperasi dan UMKM	17
BAB III PENUTUP	20
3.1 Permasalahan	20
3.2 Rencana Tindak Lanjut	21

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi, khususnya terkait rencana penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan program, proses pengambilan keputusan, serta dasar pertimbangan atas setiap kebijakan yang ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik. Peran ini tidak hanya mendukung keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan prinsip-prinsip good governance.

Sejalan dengan Visi Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, akurat, dan mudah diakses. Komitmen ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan informasi bagi pelaku usaha, pengurus koperasi, serta masyarakat luas dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dan terpercaya.

Pelayanan informasi publik yang diselenggarakan mencakup penyediaan akses yang luas terhadap berbagai informasi strategis, antara

lain data perkembangan koperasi, program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta prosedur fasilitasi dan dukungan usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya ekosistem koperasi dan UMKM yang lebih maju dan berdaya saing.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan:

- Memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik;
- Mengevaluasi kinerja PPID;
- Menjadi bahan perbaikan pelayanan informasi publik di masa mendatang.

1.3 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.
- Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Gubernur Jambi terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu secara langsung (offline) dan tidak langsung (online), guna menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Pelayanan secara offline diselenggarakan melalui Unit Pelayanan Terpadu (PLUT) yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kepada pelaku usaha, khususnya koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui PLUT, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung terkait program pemberdayaan, fasilitasi usaha, konsultasi bisnis, serta berbagai layanan teknis lainnya. Kehadiran PLUT tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan informasi, tetapi juga sebagai pusat pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha.

Sementara itu, pelayanan secara online didukung oleh Tim ODS (Online Data System) yang bertugas dalam pengelolaan layanan digital, termasuk penerimaan permohonan informasi, penyampaian data, serta pengolahan dan penyajian informasi publik secara elektronik. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Dalam mendukung kelancaran pelayanan informasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi juga didukung oleh tenaga pendamping KUMKM dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang turun langsung kelapangan, tersebar di 11 kabupaten/kota. Keberadaan tenaga pendamping dan PPKL ini berperan penting dalam menjembatani pelayanan terkait pendampingan bagi KUMKM serta kebutuhan informasi antara pemerintah dan pelaku usaha di daerah, sekaligus memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan fasilitasi usaha dapat tersampaikan secara merata hingga ke tingkat akar rumput.

Sinergi antara layanan offline melalui PLUT, layanan online oleh Tim ODS, serta dukungan tenaga pendamping dan PPKL di lapangan, membentuk suatu sistem pelayanan informasi publik yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan sistem ini, diharapkan pelayanan informasi publik pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan inklusif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). SDM penunjang PPID terdiri dari unsur pimpinan, pejabat struktural, serta staf pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Struktur SDM PPID meliputi Atasan PPID yang dijabat oleh Kepala Dinas, PPID yang dijabat oleh Sekretaris Dinas, serta PPID Pembantu yang berasal dari masing-masing bidang dan subbagian. Selain itu, terdapat tim teknis yang bertugas dalam pengumpulan data, pengolahan informasi, pendokumentasian, serta pelayanan permohonan informasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, SDM PPID memiliki peran yang terintegrasi, mulai dari penyediaan data di tingkat bidang, verifikasi dan klasifikasi informasi, hingga penyampaian informasi kepada pemohon sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Setiap personel juga dituntut untuk memahami prinsip keterbukaan informasi publik, termasuk pengelompokan informasi yang dapat diakses maupun yang dikecualikan.

Berikut susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi :

- Atasan PPID: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
- Pejabat Pengelola (PPID Pelaksana): Sekretaris Dinas.
- Bidang Pengolah Data: Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang UKM, dan Kepala Bidang Pemberdayaan.

Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi
Nomor 10 / KEP.DISKOP.UKM.1/1/ 2025
Tanggal 13 Januari 2025.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
PPID	:	Sekretaris pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan dan Program.
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kasi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi dan UKM.
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kasubag Keuangan dan Aset.
Anggota	:	1. Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran. 2. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian. 3. Staf Subbag Kasubag Keuangan dan Aset. 4. Staf Kasi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi dan UKM
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Yahya, IT ODS (Online Data Sistem). 2. Jeny Novianti, S.H, IT ODS (Online Data Sistem). 3. Bravo Aro Cardova, S.Kom, IT ODS (Online Data Sistem).



KEPALA DINAS,
Drs. SARDAINI, M.M.
Bendahara Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001

2.2. Sarana dan Prasarana

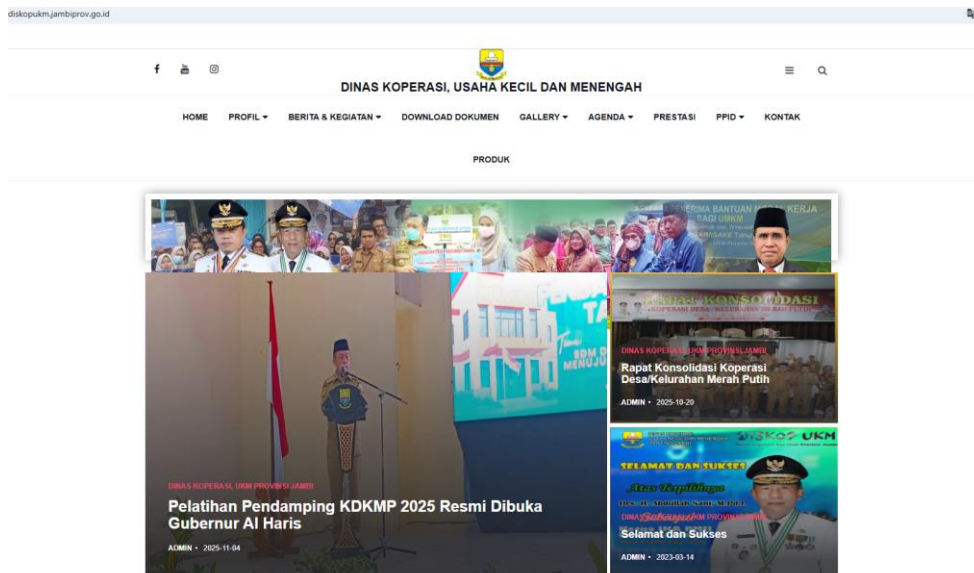
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, dan berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya menunjang kelancaran proses pelayanan informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi berupa fasilitas pelayanan baik secara tatap muka (*offline*) maupun digital (*online*):

- **Meja Layanan Informasi:** Terletak di lobby kantor, dilengkapi dengan petugas informasi.



- **Website Resmi:** diskopukm.jambiprov.go.id dan portal e-PPID.

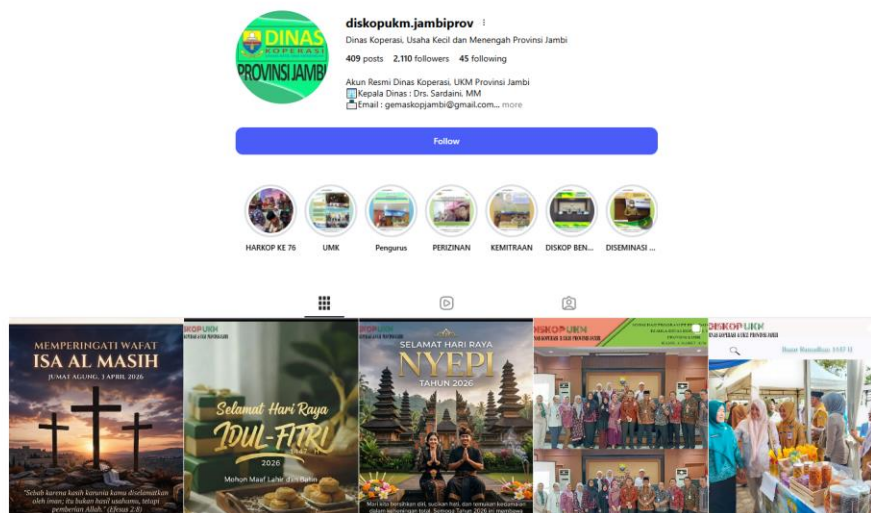


Semua Dokumen

NO	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PERINGKAT	ACTION
1	DATA KOPERASI	Laporan Pelayanan Publik	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
2	Informasi publik terkait realisasi keuangan Tahun 2024	Prosedur Menyerahkan Informasi Publik	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
3	Informasi publik terkait program strategis	Rincian Rincian Informasi Publik	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
4	Menyediakan audio visual yang menyajikan layanan informasi publik (juga informasi elektronika lainnya)	Kinerja Badan Publik	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
5	menyediakan aplikasi aplikasi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program dan/atau Kegiatan	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
6	Surat Tagihan	Pengadilan Barang dan Jasa	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
7	Dokumen Penetapan Administrasi	Pengadilan Barang dan Jasa	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
8	Daftar Kuantitas dan Harga	Pengadilan Barang dan Jasa	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
9	Manajemen PPID Publikasi	Laporan Pelayanan Publik	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link
10	Mengkoordinasikan dan mengkolaborasi proses penyampaian, pendokumentasian, pengedaran, dan pelayanan informasi Publik	Laporan Layanan Informasi Publik	Berkala	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10 October 2025	Unduh Rincian Cetak Link

Showing 1 to 10 of 234 entries | 10 items per page | Previous 1 2 3 4 5 20 Next

- **Media Sosial:** Instagram dan Facebook sebagai kanal informasi serta-merta.





- **Fasilitas Pendukung:** Komputer akses publik, ruang tunggu ramah disabilitas, dan formulir permohonan informasi.



 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI Jl. Jend. Ahmad Yani No 11, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 38122	
NO. :	
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	
Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :	
Nama Pemohon Informasi Nomor KTP (sesuai KTP)	:
Alamat Pemohon Informasi Nomor Telepon Email	: : :
Informasi Yang dibutuhkan	:
Alasan Permintaan	:
Nama Pengguna Informasi Nomor KTP (sesuai KTP)	: :
Alamat Pengguna Informasi Nomor Telepon Email	: : :
Alasan Penggunaan Informasi	:
Cara Memperoleh Informasi	: 1.Langsung; 2.Website; 3.Email; 4.Fax; 5.Via Pos;
Format Bahan Informasi	: 1.Tercetak; 2.Terekam;
Cara Mengirim Bahan Informasi	: 1.Langsung; 2.Via Pos; 3.Email;
Data dan informasi yang kami peroleh,kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
Surakarta Pemohon Informasi	
..... <u>Nama Jelas & Tanda Tangan</u>	

2. 3. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi pada program Dukungan Manajemen Perangkat Daerah untuk pengelolaan humas, website, dan dokumentasi.

PERUBAHAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR PERUBAHAN DAPRINCIN BELANJASPKD		
Provinsi Jambi TAHUN/ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA: DPPWA/3/2.17.0.00.01.0000/0012025				
Usuran Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Usuran	: 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH			
Program	: 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Unit	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp15.000.000,00			
Alokasi Tahun +1	: Rp114.065.625,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100 %	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.910.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang
Hasil	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan • Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 % • 100 %	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan • Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 % • 100 %
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Provinsi Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Telanaipura			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

https://spk.kemendagri.go.id/pentastuhan/pengeluaran/dpa/aporan/dpa/incin-belanja/316/316/12/2171397/9703/24287/print

11/12/2023, 2:34 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Pekanbaru

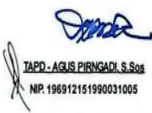
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pengeluaran										Berkurang / Bertambah (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH						Rp19.910.000,00					Rp15.000.000,00	1 Rp14.910.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp19.910.000,00					Rp15.000.000,00	1 Rp14.910.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp19.910.000,00					Rp15.000.000,00	1 Rp14.910.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp19.910.000,00					Rp15.000.000,00	1 Rp14.910.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp19.910.000,00					Rp15.000.000,00	1 Rp14.910.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp19.910.000,00					Rp0,00	1 Rp14.910.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp19.910.000,00					Rp0,00	1 Rp14.910.000,00
	[-] Uang harian pendidikan dan pelatihan, asistensi, rapat dan lainnya						Rp19.910.000,00					Rp0,00	1 Rp14.910.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Diklat dilaksanakan di Provinsi Jambi Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Diklat dilaksanakan di Provinsi Jambi	181 Orang	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp19.910.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp110.000,00	0%	Rp0,00	1 Rp14.910.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp0,00					Rp15.000.000,00	1 Rp15.000.000,00
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, asistensi, rapat dan lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0,00					Rp15.000.000,00	1 Rp15.000.000,00
	[-] Uang harian pendidikan dan pelatihan, asistensi, rapat dan lainnya						Rp0,00					Rp15.000.000,00	1 Rp15.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kabupaten di Provinsi Jambi) Spesifikasi: Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kabupaten Lebih Dan 8 (Delapan) Jam				Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp19.910.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			Rp15.000.000,00		

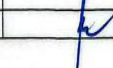
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp2.000.000,00
Maret	Rp2.000.000,00
April	Rp500.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp7.500.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp15.000.000,00

Jambi, tanggal 06 November 2025
KEPALADINAS KOOPERASI USAHAKECIL DAN MENENGAH


DRS. SARIMIN, M.M.
NIP. 196705201994021001

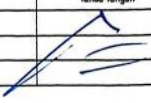
Mengesahkan,
PPKD


TAPD: AGUS PIRNGADI, S.Sos
NIP. 196912151990031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. SUDIRMAN, S.H, M.H.	196801091992031002	Ketua TAPD	
2.	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3.	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota	
4.	ARIEF MUJANDAR, SE., M.Sos	196703071999031004	Anggota	
5.	H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si	196910031998031005	Anggota	

<https://ipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/316/316/12/217/13979703/24287/print>

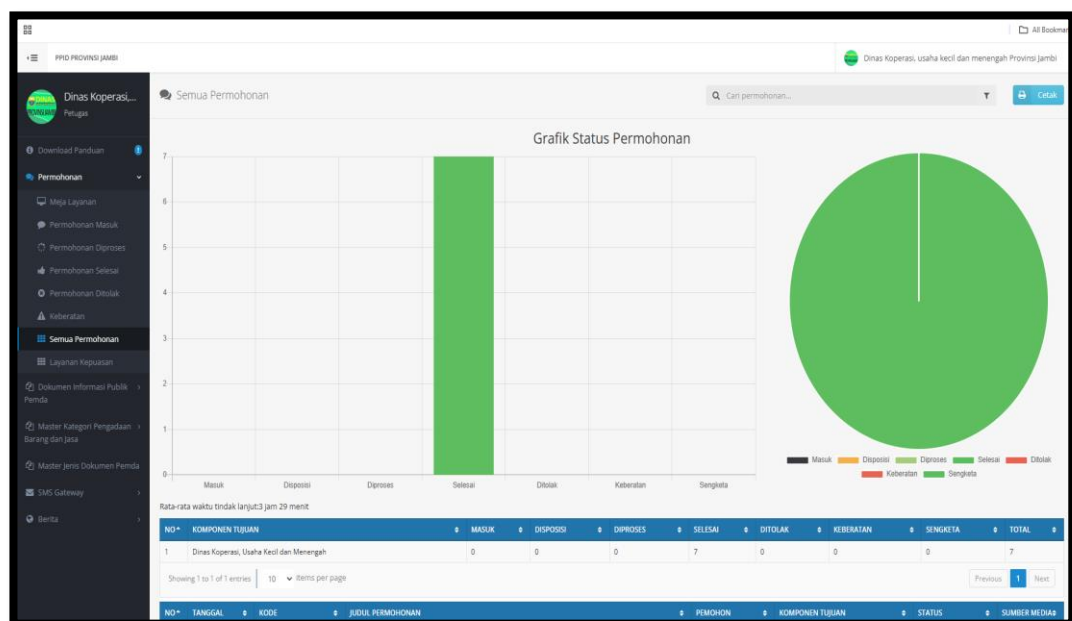
3/4

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si	196804211994021004	Anggota	
7.	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	
8.	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	

2.4. DATA PELAYANAN INFORMASI

1. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Jumlah	Tindak Lanjut
1	Permohonan Informasi	7	100% Selesai
2	Pengaduan Masyarakat	0	-



2. 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan kuesioner layanan informasi, diperoleh nilai IKM sebesar **91,5750** yang berarti kualitas pelayanan masuk dalam kategori "**Sangat Baik**".

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan nilai mencapai **91,5750** berdasarkan laporan hasil pengolahan data survei. Angka ini masuk dalam **mutu pelayanan A (Sangat Baik)**, yang diukur dari komponen prosedur, waktu, kompetensi petugas, serta sarana dan prasarana. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi

Detail Kinerja Layanan:

- **Nilai IKM (2022):** Berdasarkan, capaian IKM pada laporan tahun 2022 menunjukkan angka 88,9%.
- **Nilai IKM (Terbaru):** Data dari Laporan Pengaduan, IKM Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi mencapai 91,5750 (predikat A/Sangat Baik).
- **Target (2023):** Dinas menetapkan target nilai IKM 86,0.
- **Kualitas Pelayanan:** Berdasarkan, survei mencakup nilai per unsur yang hasilnya sangat baik. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi +2

Capaian ini didukung oleh upaya perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan bagi pelaku Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi.

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

SKPD / Unit Pelayanan
Alamat
Telepon/Fax

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
Jl. Jend. A. Yani No. 11 Telanipura Jambi
0741 - 51740

A. NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
5	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
6	3	3	3	3	3	4	4	3	4	
7	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
8	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
9	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
10	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
11	3	3	3	4	3	4	4	3	4	
12	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
13	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
16	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
17	3	3	3	4	3	4	4	3	4	
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai /Unsur	105	104	107	119	107	109	114	105	120	
NRR / Unsur	3.500	3.467	3.567	3.967	3.567	3.633	3.800	3.500	4.000	
NRR tertbg/	0.389	0.385	0.396	0.440	0.396	0.403	0.422	0.389	0.444	3.663
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
	87.50	86.67	89.17	99.17	89.17	90.83	95.00	87.50	100.00	
IKM pelayanan SKPD/Unit Pelayanan										91.575

B.			
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	NRR x 25
U1	Penyerahan pelayanan	3.500	87.50
U2	Prosedur pelayanan	3.467	86.67
U3	Waktu pelayanan	3.567	89.17
U4	Biaya/tarif pelayanan	3.967	99.17
U5	Produk/hasil pelayanan	3.567	89.17
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.633	90.83
U7	Perilaku petugas pelayanan	3.800	95.00
U8	Maklumat pelayanan	3.500	87.50
U9	Mekanisme pengaduan pelayanan	4.000	100.00

Keterangan :

- U1 s.d. U9

- NRR

- IKM

- 3

- 3.663

NRR Per Unsur

NRR tertimbang
per unsur

= Unsur-Unsur pelayanan

= Nilai rata-rata

= Indeks Kepuasan Masyarakat

= Jumlah NRR IKM tertimbang

= Jumlah NRR Tertimbang x 25

= Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang diisi

= NRR per unsur x 0,111

IKM PELAYANAN SKPD :	91.5750
Mutu Pelayanan :	A

A (Sangat Baik)	: 81.26 - 100,00
B (Baik)	: 62.51 - 81,25
C (Kurang Baik)	: 43.76 - 62,50
D (Tidak Baik)	: 25.00 - 43,75



2.6. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama periode Januari hingga Desember 2025, data penyelesaian sengketa informasi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Permohonan Keberatan: **NIHIL**
- Mediasi ke Komisi Informasi: **NIHIL**
- Putusan Sidang Sengketa: **NIHIL**

Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh permintaan informasi dapat dipenuhi oleh petugas PPID Pelaksana tanpa melalui proses sengketa.

DATA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK				
NO	TANGGAL SURAT	URAIAN	DATA YANG DIMINTA	KETERANGAN
1	16 Januari 2025	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI	Undangan Focus Grup Discussion (FGD) Pembahasan Data Provinsi Jambi Dalam Angka 2025	Selesai
2	14 Januari 2025	KEMENRISTEK DIKTI UNIVERSITAS JAMBI	Permohonan izin wawancara, penelitian dan permintaan data	Selesai
3	10 Juni 2025	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI	Memperoleh data penelitian	Selesai
4	9 Januari 2025	UNIVERSITAS BATANGHARI	Permohonan permintaan data untuk menyusun proposal skripsi	Selesai
5	15 Juli 2025	Danantara Indonesia (BTN)	Permohonan permintaan data Koperasi Provinsi Jambi	Selesai



KEPALA DINAS
DR. SARDANI, MM
Pembina Utama Madya - IV/c
NIP. 19670520 199402 1 001

2.7. Evaluasi dan Capaian Pelayanan Informasi

a. Capaian Eksternal (Hasil Baik):

- **Meningkatnya Literasi Digital Pelaku UMKM:** Masyarakat dan pelaku UMKM kini semakin mahir dalam menggunakan kanal digital e-PPID untuk permohonan informasi, terlihat dari tren kenaikan jumlah permohonan yang masuk melalui website resmi.
- **Pemahaman Regulasi yang Baik:** Pemohon informasi telah memahami klasifikasi informasi publik, sehingga tidak ada lagi sengketa atau keluhan terkait permintaan data pribadi yang dikecualikan sesuai UU KIP.

b. Capaian Internal (Hasil Baik):

- **Sinergi dan Integrasi Data yang Optimal:** Telah terbangun koordinasi yang solid antar bidang di Dinas Koperasi dan UKM, sehingga seluruh data sektoral tersedia secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses secara *real-time*.
- **Kompetensi Petugas yang Profesional:** Petugas pelayanan PPID telah memiliki kompetensi yang mumpuni dalam tata kelola informasi publik, sehingga mampu memberikan respon pelayanan secara cepat, tepat, dan ramah sesuai standar operasional prosedur (SOP).

2.8. Data Sektoral Koperasi dan UMKM

Berikut adalah gambaran data informasi yang paling sering diminta oleh publik selama tahun 2025:

1. **Data Koperasi:** Jumlah Koperasi Aktif (Rapat Anggota Tahunan/RAT) di Provinsi Jambi Per 31 Desember 2025



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**
Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361



REKAPITULASI DATA KOPERASI TINGKAT PROVINSI JAMBI
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025

NO	KABUPATEN / KOTA	KOPERASI (unit)			ANGGOTA (Orang)			RAT		SERTIFIKAT NIK		JENIS KOPERASI							
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	L	P	JUMLAH	(Unit)	(%)	JML	(%)	Jasa	Konsumen	Pemasaran	Produsen	Sp. Pinjam	Merah Putih	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Kerinci	470	62	532	182	463	645	8	2%	58	12%	3	113	15	109	5	287	532	
2	Merangin	314	217	531	4,776	3,138	7,914	35	11%	44	14%	11	138	17	136	14	215	531	
3	Sarolangun	419	33	452	3,490	1,331	4,821	26	6%	39	9%	12	188	9	72	13	158	452	
4	Batanghari	242	224	466	9,537	1,958	11,495	55	23%	63	26%	9	141	5	170	17	124	466	
5	Muaro Jambi	312	215	527	15,160	2,556	17,716	39	13%	40	13%	10	172	10	159	18	158	527	
6	Tanjung Jabung Timur	144	190	334	2,611	1,276	3,887	40	28%	24	17%	6	152	2	76	6	92	334	
7	Tanjung Jabung Barat	311	80	391	20,246	577	20,823	84	27%	93	30%	13	99	6	117	20	136	391	
8	Tebo	283	192	475	4,465	1,166	5,631	26	9%	39	14%	20	69	4	242	11	129	475	
9	Bungo	409	7	416	8,058	3,491	11,549	47	11%	79	19%	13	133	11	82	23	154	416	
10	Kota Jambi	305	479	784	8,059	7,950	16,458	106	35%	96	31%	51	544	9	41	71	68	784	
11	Kota Sungai Penuh	171	35	206	1,337	1,312	2,649	42	25%	57	33%	0	114	3	10	10	69	206	
12	Binaan Provinsi	253	16	269	5,822	6,489	12,311	40	16%	40	16%	72	88	11	70	27	1	269	
13	Binaan Nasional	101	78	179	333	53	386	4	4%	10	10%	23	46	10	88	12	0	179	
Total		3,734	1,828	5,562	84,076	31,760	115,836	552	15%	682	18%	243	1,997	112	1,372	247	1,591	5,562	

*** Data diatas di olah dari Database Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang di update secara Real Time



JAMBI, 31 DESEMBER 2025
KEPALA DINAS
DRS. SARDANI, MM

2. Data UMKM: Sebaran pelaku UMKM Se-Provinsi Jambi Tahun 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 21, Telukagung, Kec. Telukagung, Kota Jambi, Jambi 36361
Telepon : (0742) 81740-8000 Fax (0742) 81740 Kuala Pos. 36322

REKAPITULASI DATA UMKM KABUPATEN KOTA SEPROVINSI JAMBI
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	USAHA			JUMLAH	TENAGA KERJA	ASSET	OMSET	KETERANGAN
		MIKRO	KECIL	MENENGAH					
1	MERANGIN	25,651	254	28	25,917	45,168	Rp. 551,487,299,917	Rp. 1,425,807,017,805	
2	KOTA JAMBI	46,996	3,835	5	50,836	149,629	Rp. 1,269,925,000,000	Rp. 11,324,300,000,000	
3	SAROLANGUN	17,358	215	17	17,590	36,825	Rp. 284,098,925,000	Rp. 916,350,000,000	
4	KOTA SUNGAI PENUH	19,121	115	14	19,250	29,296	Rp. 717,679,221,308	Rp. 925,012,211,585	
5	KERINCI	24,569	646	69	25,284	43,430	Rp. 495,697,300,000	Rp. 879,453,000,000	
6	BATANG HARI	12,867	115	6	12,988	24,946	Rp. 163,778,852,008	Rp. 610,040,192,844	
7	BUNGO	12,430	195	15	12,640	16,815	Rp. 490,865,360,802	Rp. 961,260,721,604	
8	TANJUNG JABUNG BARAT	19,783	1,048	2	20,848	22,830	Rp. 275,846,559,200	Rp. 738,777,072,000	
9	TEBO	25,477	319	36	25,832	52,715	Rp. 302,789,430,000	Rp. 543,914,505,000	
10	MUARO JAMBI	41,232	2	2	41,236	119,674	Rp. 414,810,000,000	Rp. 1,496,424,000,000	
11	TANJUNG JABUNG TIMUR	21,292	112	23	21,427	30,252	Rp. 421,560,000,000	Rp. 24,795,951,019,878	
	JUMLAH	258,720	6,836	217	265,843	565,580	Rp. 5,345,588,248,233	Rp. 44,557,709,760,716	
	TAJULIN 2024	258,720	6,836	217	265,843	565,580	Rp. 5,345,588,248,233	Rp. 44,557,709,760,716	
	PERKEMBANGAN (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Berdasarkan PP UMKM No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Model usaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

JAMBI, 31 DESEMBER 2025
Kepala Dinas

DIRS. YANDAINI, MM
(Rp. 19670520 199402 1 001)

3. Program Bantuan:

Data Bantuan Modal Serta Data Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan alat bagi UMKM Tahun 2025.

A. Data Bantuan Modal Pelaku UMKM Se Provinsi Jambi Tahun 2025.

NO.	KABUPATEN / KOTA			TOTAL KESELURUHAN
		2025	2025 (ABT)	
		TOTAL	TOTAL	
1	2	14	14	14
1	KOTA JAMBI	0 UMKM	29 UMKM	29 UMKM
2	MUARO JAMBI	37 UMKM	13 UMKM	17 UMKM
3	BATANGHARI	5 UMKM	26 UMKM	35 UMKM
4	BUNGO	0 UMKM	5 UMKM	6 UMKM
5	TEBO	0 UMKM	19 UMKM	25 UMKM
6	MERANGIN	0 UMKM	17 UMKM	27 UMKM
7	SAROLANGUN	13 UMKM	10 UMKM	13 UMKM
8	TANJUNG JABUNG BARAT	12 UMKM	39 UMKM	57 UMKM
9	TANJUNG JABUNG TIMUR	0 UMKM	12 UMKM	15 UMKM
10	KERINCI	0 UMKM	30 UMKM	43 UMKM
11	KOTA SUNGAI PENUH	0 UMKM	6 UMKM	11 UMKM
	JUMLAH	67 UMKM	206 UMKM	278 UMKM

B. Data Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Alat Bagi UMKM Se Provinsi Jambi Tahun 2025.

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLH	PESERTA	JUMLAH	KETERANGAN
	DAJIL	PELAKSANAAN	UMKM	PESERTA	
1.	BATANG HARI	4	15	60	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
2.	MUARO JAMBI	5	15	75	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
3.	KOTA JAMBI	10	15	150	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
4.	SAROLANGUN	4	15	60	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
5.	MERANGIN	6	15	90	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
6.	KERINCI	3	15	45	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
7.	SUNGAI PENUH	3	15	45	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
8.	BUNGO	5	15	75	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
9.	TEBO	6	15	90	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
10.	TANJAB TIMUR	4	15	60	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3. Pelt. Kue basah/kering
11.	TANJAB BARAT	5	15	75	1. Pelt. Kwr Kopi keninan 3 x 2. Pelt. Kwr Ayam krispy 3 x 3. Pelt. Kue basah/kering 3 x
	JUMLAH	55		825	

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi selama tahun berjalan secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, baik melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ketersediaan layanan informasi secara offline melalui Unit Pelayanan Terpadu (PLUT) serta layanan online yang didukung oleh Tim ODS, ditambah dengan peran tenaga pendamping KUMKM dan PPKL di seluruh kabupaten/kota, telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses informasi kepada masyarakat. Hal ini turut mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian bersama guna peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan

3.1 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPID antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Jumlah dan kompetensi SDM yang secara khusus menangani pengelolaan informasi publik masih terbatas, sehingga berdampak pada optimalisasi pelayanan.
- Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi

- Pemutakhiran data dan dokumentasi informasi publik belum sepenuhnya berjalan secara berkala dan terintegrasi di seluruh unit kerja.
- Pemahaman Keterbukaan Informasi yang Belum Merata
- Masih terdapat unit kerja yang belum sepenuhnya memahami prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam klasifikasi dan penyediaan informasi.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung
- Fasilitas pendukung pelayanan informasi, terutama berbasis teknologi informasi, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung layanan yang lebih cepat dan efisien.
- Jangkauan Pelayanan yang Luas
- Luasnya wilayah pelayanan hingga ke 11 kabupaten/kota menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pemerataan akses informasi bagi seluruh pelaku koperasi dan UMKM.

3.2. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dirumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas SDM PPID

Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi pengelola informasi publik.

2. Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi

Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala serta membangun sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi.

3. Peningkatan Pemahaman Internal

Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait keterbukaan informasi publik kepada seluruh perangkat organisasi.

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan fasilitas layanan informasi berbasis digital, termasuk penguatan website dan sistem layanan informasi online.

5. Penguatan Sinergi Layanan

Mengoptimalkan peran PLUT, Tim ODS, tenaga pendamping KUMKM, dan PPKL sebagai jaringan pelayanan informasi hingga ke daerah.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan evaluasi rutin terhadap kinerja pelayanan PPID guna memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan. Diharapkan, melalui penguatan peran PPID, keterbukaan informasi publik dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam pengembangan koperasi dan UMKM yang maju dan berdaya saing.

JAMBI, 31 DESEMBER 2025

KEPALA DINAS / ATASAN


DRS. SARDAINI, MM
NIP. 19670520 199402 1 001